

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologi*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Jakarta: Raja Wali Pres, 2014.
- Effendi, Joenadi dan Jhony Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Paramedia Group, 2018.
- Fuller, Lon L, *The Morality of Law*, McGraw-Hill: Yale University Press, 1964.
- Irawan, James Julianto, *Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Jakarta: Megapoin Divisi dari Ksaint Blanc, 2003.
- Ishaq, H, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Kurniawan, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Lumban Tobing, G.H.S, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1983.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Makarim, Edmon, *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Elektronik Notary*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

- Prasetya, Rudhi, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Sasangka, Hari, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2005.
- Seokanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Situmorang, M. V dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Acta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Subekti, *Hukum Acara Perdata Cetakan Ke-II*, Bandung: Bina Cipta, 1982.

Jurnal

- Beamezar Daffa Alkautsar dan Denny Suwondo, "Perlindungan Hukum Perseroan Terbatas (PT) Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, vol. 1, no. 1, 2020.
- Cahya Kusuma, Dimas, "Pertanggungjawaban Perseroan Perorangan Pasca Pergeseran Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Persekutuan Modal," *Jurnal Lex Renaissance*, vol. 7, no. 3, 2022.
- Evy Savitri Gani, "Perlindungan Hukum Pekerja Harian Lepas Akibat Kecelakaan Kerja (Studi Pada Pengemudi Angkutan Kota di Kota ambon)," *Jurnal Tahkim IAIN AMBON*, vol. 16, no. 1, 2020.
- Hernawati RAS dan Joko Trio Suroso, "Kepastian Hukum Dalam Dalam Hukum Investasi di Indonesia Melalui Omnibus Law," *Jurnal Ilmiah MEA*, vol. 4, no 1, 2020.
- Johan Wahyudi, "Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian di Pengadilan," *Jurnal Perspektif Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya*, vol. XVII, no. 2, 2012.
- Muhammad Arya Azzurba, "Keabsahan Akta Penegasan dalam Pembukaan Rekening Perseroan Terbatas Perorangan," *Jurnal Ilmu Sosial*, vol. 3, no. 3, 2023.
- Nasarudin Umar dan Tuti Haryanti, "Efektivitas Penerapan dan Pengawasan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) Bagi Notaris di Provinsi Maluku," *Jurnal Tahkim IAIN Ambon*, vol. XIX, no. 1, 2023.
- Pangesti, Shinta, "Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Rechts Vinding*, vol. 10, no.1, 2021.

- Prabu, Alexander at al., “Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law,” *Jurnal Lex Specialis*, vol. 1, no. 2, 2020.
- Putu Inten Andhita Dewi dan I Wayan Noya Purwanto, “Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja,” *Jurnal Hukum Kenotariatan*, vol. 6, no. 3, 2021.
- Putu Bagus Bimandika Arnawa dan Gusti Ngurah Dharma Laksana, “Pendirian Perseroan Perorangan Oleh Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Dalam Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Kertha Wicara*, vol. 11, no. 4, 2022.
- Sinaulan, “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat,” *Jurnal IDEAS*, vol. 4, no. 1, 2018.
- Sylvia Putrid dan David Tan, “Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Di Tinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja Dan Undang-Undang Perseroan Terbatas”, *Jurnal Unes Law Review*, vol. 4, no. 3, 2022.
- Tuti Haryanti, “Hukum dan Masyarakat,” *jurnal Tahkim IAIN Ambon*, vol. 2, no. 2, 2014.

Tesis

- Saka Negara, “Implikasi Hukum Perseroan Perorangan Sebagai Perseroan Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” *Tesis Universitas Islam Indonesia*, 2022.

Skripsi

- Muhammad Fariel Nabawi, “Implikasi Hukum Pendirian Perseroan Perorangan Bagi Pelaku Usaha dan Kekuatan Pembuktian Surat Pernyataan Pendirian Secara Elektronik,” *Skripsi Fakultas Hukum UII*, 2022.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pengganti Undang-undang No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang LN 2023

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar, Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggara Sertifikat Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

Website

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, “Penyelenggara Sertifikasi elektronik (PSrE) Indonesia,” (2021), <https://tte.kominfo.go.id/apaitu> (diakses pada tanggal 26 April 2024)

Direktur Perdata Kementerian Hukum dan HAM pada seminar “Sosialisasi Perseroan Perorangan Bagi UMK,” pada 30 November 2021 secara online, diakses dari Youtube <https://www.youtube.com/watch?v=jrQ963eFvbg> (diakses tanggal 21 April 2024)

Heti Hasanah, “Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia,” Artikel (2015), <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>. (diakses pada tanggal 28 April 2024)

Jusuf Patrianto Tjahjono, Tim Legal Hukum, “Dengan Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE,” (2018), www.legal-hukum.co.id (diakses pada tanggal 26 April 2024)

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMK), “Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar (UB) Tahun 2017-2018, <https://www.kemenkopukm.go.id/uploads/laporan.pdf>, (diakses pada tanggal 13 April 2024).

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMK), “Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB)

Tahun 2018-2019, <https://www.kemenkopukm.go.id/uploads/laporan.pdf>,
(diakses pada tanggal 13 April 2024).

Kementerian keuangan RI, “Mengenal Jenis Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata,” (djkn.kemenkeu.go.id) diakses pada tanggal 26 April 2024.

Kementerian Komunikasi dan Informatika, “Penyelenggara Sertifikat Elektronik: Melihat Keuntungan dibalik Tanda Tangan Elektronik, “ diakses pada <https://tte.kominfo.go.id> (diakses pada 11 Juni 2024)

Tim Legal Satu, “Sertifikat PT Perorangan: Fungsi dan Proses Pengurusan” - Legal Satu (<https://legalsatu.id/blog/sertifikat-PT-Perorangan/>) di akses pada tanggal 21 Februari 2024.

Lampiran-lampiran

1. Sertifikat Pendirian PT Perorangan



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT PENDAFTARAN PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN

NOMOR : AHU- Tahun 2023

PT BAROKAH

Berkedudukan di BUOL

telah terdaftar sebagai badan hukum dan tercatat dalam pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Sertifikat ini berlaku sejak tanggal diterbitkan.



Jakarta, 31 Desember 2023

a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

2. Surat Pernyataan Pendirian PT Perorangan



PERNYATAAN
PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN

Data Perseroan

1. Nama perseroan	: PT HAMBI SUMBER JAYA
2. Alamat Lengkap	: Jl. Raya No. 20, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta
3. Kegiatan Usaha	: <ul style="list-style-type: none"> • 01110 - Perikanan Cenderung • 01111 - Perikanan Kolam • 01114 - Perikanan Kandang Tersekat
4. Modal Usaha	: Rp. 100.000.000,00

Data Pemilik Usaha

a. Nama Lengkap	: Andi Sudharta
b. Tanggal Lahir	: 4 April 1988
c. Alamat Lengkap	: Jalan Raya No. 100, Kota Adm. Jakarta Selatan
d. Nomor Induk Kependudukan	: 50000000012125
e. Nomor Pokok Wajib Pajak	: 50.000.000.0012.125

Saya selaku Pendiri bertanggung jawab atas data yang Saya isi dan bersedia untuk menaati peraturan yang berkaitan dengan Perseroan Perorangan dan peraturan terkait lainnya.



Surat Pernyataan telah disetujui Pemohon secara elektronik.

3. SK-Pengesahan Badan Hukum Perseroan



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
Nomor: AHU-22112.AH.01.01.Tahun 2009
TENTANG
PENGESEHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 01, tanggal 8 April 2009 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Chatarina Anggia Ika Hariwati Diah Kusuma Wardhani, SH dan diterima pada tanggal 19 Mei 2009, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
PERTAMA : Mengesahkan badan hukum PT. ASIA PASIFIC SUPERYACHTS INDONESIA, berkedudukan di Surabaya - Kotamadya Surabaya karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum, dan salinan Akta Nomor 01, tanggal 8 April 2009 yang dibuat oleh Notaris Chatarina Anggia Ika Hariwati Diah Kusuma Wardhani, SH berkedudukan di Kabupaten Mojokerto.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Mei 2009

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PEM DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Abdul Bari Azed

Prof. ABDUL BARI AZED, SH, MH
NIP. 130 610 869

Daftar Perseroan Nomor AHU-0028287.AH.01.09.Tahun 2009 Tanggal 19 Mei 2009

4. Daftar Riwayat Hidup (CV) Penulis

HILMIAH ARIF



Tentang Saya

- Hilmiah Arif
- Perempuan
- Ambon, 29 Agustus 2002
- Islam
- Mahasiswa
- Belum Menikah
- Stain, RT 01/RW 17
- IPK 3, 94
- Semester viii (delapan)
- Fakultas Syariah
- Prodi Hukum Ekonomi Syariah
- IAIN Ambon

Orang Tua

Nama Orang Tua
Ayah : Drs. Arifin, M. M.Si (Alm)
Ibu : Hamriah

Pekerjaan Orang Tua
Ayah : -
Ibu : Ibu Rumah Tangga (IRT)

HOBI

- Membaca
- Menulis

KEAHLIAN

- Publik Speaking
- Personal Branding
- Menguasai Microsoft Word & Power Point
- Menguasai Mesin FotoCopy
- Menulis
- Berwirausaha
- Problem Solving

IPK
3, 94

PENDIDIKAN

- SD NEGERI 93 AMBON (2008-2014)
- MTS. NEGERI BATU MERAH AMBON (2014-2017)
- MA NEGERI AMBON (2017-2020)
- IAIN AMBON (2020-2024) S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH

PRESTASI AKADEMIK

- Mahasiswa IP tertinggi Pertama di Prodi Hukum Ekonomi Syariah pada Yudisium Fakultas syariah tahun 2021-2023
- Juara 3 Lomba Essay tingkat Nasional pada Lomba GEBYAR HESY IAIN AMBON Tahun 2020
- Juara Harapan 2 Lomba Essay tingkat Nasional pada Lomba GEBYAR HESY IAIN AMBON Tahun 2021
- 5 besar peserta ESSAY pada kegiatan Islamic Ekonomi Fest (IEF) ke-VII yang di laksanakan oleh IAIN BONE

Pengalaman Organisasi

- Sekretaris Devisi Lingkungan Hidup GenBI komisariat IAIN Ambon Periode 2022-2023
- Ketua HUMAS Tim Analisis Falakiyah Fakultas Syariah (AFATAR) IAIN Ambon
- Pengurus HIMAPRO Hukum Ekonomi Syariah
- Sekretaris Keilmuan KSEI EKSU IAIN AMBON
- Anggota Agen Bahasa IAIN Ambon

Kontak

-  0823-9838-9480
-  FB : Miah
IG : hilmiaharif
-  arifhilmiah@gmail.com